

CORRUPTION AND POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA

Fitri Zahrotul Jannah , Dwi Susilowati

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl.Raya Tlogomas No.246 Malang, Indonesia

* Corresponding author: fitrizahrotuljannah@gmail.com

Artikel Info

Article history:

Received 18 April 2019

Revised 20 April 2019

Accepted 20 May 2019

Available online 21 May 2019

Keyword: *Poverty; economic growth; human development index (HDI); and corruption*

JEL Classification

D73; I32; O47

Abstract

Poverty is an economic problem that occurs in both developing and developed countries that have not been overcome. Percentage of poverty in Indonesia 10.12%. While the average provincial poverty rate in Indonesia is more than 50%. Therefore it is necessary to find a solution to overcome or at least reduce poverty. A growing economy is expected to reduce poverty. The requirement for sustainable economic growth is the existence of a fair system of government. This study aims to determine the effect of economic growth, the human development index, and corruption on poverty in the province of Indonesia. This research used secondary data from 2013 to 2017. The method used is panel data analysis method. The results show that the effect of economic growth on poverty is negatively insignificant, while for the variable corruption against poverty is a significant positive and for the human development index on poverty is a significant negative.

PENDAHULUAN

Permasalahan di Indonesia yang belum dapat diatasi yaitu tingginya kemiskinan. Cerminan kondisi kesejahteraan penduduk suatu negara dapat dilihat dari kondisi kemiskinan. Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian. Garis kemiskinan (poverty line) digunakan sebagai ukuran kemiskinan, dimana sebagai batas ketidakmampuan seseorang dalam memperoleh pendapatan yang telah ditetapkan. World Bank (2004) mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Dimana apabila pendapatan seseorang kurang dari US\$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin.

Penduduk dikatakan miskin apabila pengeluaran perkapita perbulan berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2013 garis kemiskinan Indonesia sebesar Rp 275.779, setiap bulannya rata-rata mengalami kenaikan sebesar 10,9 persen. Pada tahun 2017 besar garis kemiskinan Indonesia adalah Rp 387.220 pada tahun ini garis kemiskinan Indonesia mengalami peningkatan 3,27 persen setiap bulannya.

Pada tahun 2013-2017 tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan sebesar 11,47 persen dan terus mengalami penurunan hingga 10,12 persen pada tahun 2017. Namun jika dilihat dari kemiskinan tiap provinsi di Indonesia masih ada beberapa provinsi yang justru mengalami peningkatan kemiskinan. Pada tahun 2017 untuk tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia berada pada provinsi Papua. Meskipun menjadi provinsi tertinggi tingkat kemiskinan di Indonesia namun selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 sebesar 31,53 persen hingga tahun 2017 sebesar 27,76 persen. Sedangkan untuk tingkat

kemiskinan terendah dari tahun 2013 hingga 2017 berada di provinsi D.K.I Jakarta. Dimana setiap tahunnya justru cenderung selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan sebesar sebesar 3,72 persen hingga tahun 2017 sebesar 3,78 persen. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka ratio gini antar provinsi di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki trend pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2013-2017 rata-rata pertumbuhan ekonomi berkisar 5,0 sampai 5,5 persen hal tersebut terlihat cukup dinamis. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2017 berada pada provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2013 sebesar 6,36 hingga tahun 2017 sebesar 7,67 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2013 hingga 2016 berada di provinsi kalimantan Timur dimana angka tersebut mencapai minus 0,62 persen hingga minus 0,36 persen.

Namun justru pada tahun 2017 Kalimantan Timur pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan. Hingga merubah posisi pertumbuhan ekonomi terendah yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengalami penurunan di tahun 2017, dimana pertumbuhan ekonominya hanya sebesar 0,11 persen. Angka pertumbuhan tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia semakin membaik. Namun secara empiris pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dianggap semu, karena dilihat dari tingginya angka kemiskinan di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda menghilang.

Modal manusia yang berkualitas tentunya sangat diperlukan oleh pemerintah sebagai salah satu modal dasar pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Kemiskinan seseorang dapat dilihat dari kurangnya kesejahteraan yang dimiliki orang tersebut. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 IPM hanya sebesar 68,31 persen kemudian mengalami peningkatan hingga 70,81 persen di tahun 2017. Indonesia memiliki predikat “tinggi” pada indeks pembangunan manusianya di tahun 2017.

Hal tersebut terjadi karena nilai IPM Indonesia pada tahun 2017 lebih besar (>) dari nilai enam puluh (60) sehingga masuk pada kriteria “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi”. indeks pembangunan manusia provinsi di Indonesia pada tahun 2013 hingga 2017 berada pada provinsi D.K.I Jakarta yang mana selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 sebesar 78,08 persen hingga tahun 2017 mencapai angka 80,06 persen. Hal ini dapat dikatakan bahwa indeks pembangunan manusia provinsi D.K.I. Jakarta masuk dalam kategori tinggi.

Sedangkan untuk indeks pembangunan manusia terendah berada di provinsi Papua. IPM provinsi Papua juga mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun menjadi provinsi dengan IPM terendah. Pada tahun 2013 sebesar 56,25 persen hingga pada tahun 2017 meningkat sebesar 59,09 persen. Hal ini dapat dikatakan bahwa indeks pembangunan manusia provinsi Papua masuk dalam kategori rendah. Tetapi dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM yang tinggi hal tersebut tidak diikuti oleh penurunan kemiskinan.

Hal tersebut disebabkan karena meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kenaikannya lamban dan penyebaran perekonomian masih belum

merata, sedangkan di Indonesia jumlah penduduk terus meningkat dengan cepat sehingga dapat mendorong pengurusan sumber daya dan kekurangan tabungan yang kemudian dapat memunculkan kemiskinan, keterbelakangan, dan kelaparan. Meskipun indeks pembangunan manusia tinggi tetapi jumlah penduduk terus meningkat, sedangkan untuk ketersediaan lapangan pekerjaan masih tetap, maka akan menyebabkan angka pengangguran meningkat dan tidak memperoleh penghasilan yang diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka jika kebutuhan hidup masyarakat itu terpenuhi dan berada di atas garis kemiskinan, maka tidak akan dikatakan miskin.

Badan Pusat Statistika (2012), ukuran keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat melalui pencapaian besarnya nilai indeks pembangunan manusia di negara tersebut. IPM dapat dilihat melalui tiga komponen data yang dianggap dapat mendorong keberhasilan pembangunan manusia sebagai berikut: (1) angka harapan hidup yang menggambarkan keberhasilan dalam bidang kesehatan, (2) angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah menggambarkan keberhasilan dalam bidang pendidikan, (3) kemampuan daya beli yang mana dapat dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita sebagai gambaran keberhasilan dibidang pembangunan hidup yang layak.

Terdapat faktor lain yang dianggap sebagai penyebab kemiskinan, yaitu tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Adanya korupsi menyebabkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk proses pembangunan yang mendorong penurunan kemiskinan seperti bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan ketersediaan lapangan pekerjaan menguap ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Korupsi di negara berkembang disebabkan oleh lemahnya investasi dalam bentuk modal kapital dan modal manusia, sehingga kurang dalam penanganan akses ke lembaga keuangan yang akan mendorong terjadinya kemiskinan (Deininger, 2000 dan Waluyo, 2004).

Pada sisi lain pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Pada tahun 2015 di Indonesia terjadi tindak korupsi terbanyak yaitu sebesar 1806 kasus. Sedangkan di tahun 2017 mulai mengalami banyak penurunan yaitu 518 kasus. Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun daerah terhadap APBD, bisa memperlambat program pemerintah dalam hal mengurangi angka kemiskinan. Dana yang seharusnya disediakan dan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, bisa jadi tidak tepat sasaran. Bisa saja dana tersebut, masuk ke kantong pribadi para pejabat.

Pidana korupsi tertinggi provinsi di Indonesia pada tahun 2013 hingga tahun 2017 berada pada provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2013 kasus korupsi di Jawa Timur sebanyak 21 kasus hingga mengalami peningkatan pada tahun 2015 mencapai 171 kasus korupsi. Namun pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami penurunan hingga tersisa sebanyak 56 kasus. Sedangkan untuk pidana korupsi terendah dari tahun 2013 hingga 2017 berada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2013 hingga 2015 kasus korupsi di Kepulauan Bangka Belitung selalu mengalami peningkatan dari 1 kasus hingga menjadi 24 kasus korupsi di tahun 2015. Namun pada tahun 2016 hingga 2017 hanya terdapat 2 kasus korupsi yang ditetapkan.

Melemahnya anggaran negara akan berdampak pada kurangnya kemampuan negara untuk mereduksi korupsi. Hal ini menyebabkan kemiskinan makin terpuruk (Maria Hartiningsih (Ed), 2011). Menurut Blackburn et al. (2006), korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan. Namun, beberapa orang menganggap bahwa korupsi digunakan sebagai *oiling the wheel* untuk birokrasi, terkadang korupsi juga dapat bermanfaat bagi perekonomian (Huntington, 1968; Lui, 1985).

Namun seiring dengan berjalannya waktu, perbaikan sedikit demi sedikit terus dilakukan, berbagai program diorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, begitu juga dengan peran ekonomi masyarakat terus digeliatkan sebagai partisipasi peningkatan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan. Semua itu tentu mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagai sarana untuk menjawab pertanyaan tentang apakah pertumbuhan ekonomi, IPM, dan korupsi berdampak terhadap kemiskinan provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2013-2017?

Hasil penelitian Franciari (2010) mengenai “Analisis Hubungan Ipm, Kapasitas Fiskal, Dan Korupsi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2008 Dan 2010)”. Metode penelitian yang digunakan Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan program Eviews 6 dan Uji kausalitas granger. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2008 dan 2010 IPM berpengaruh, tetapi tidak signifikan mempengaruhi tinggi rendahnya kemiskinan. Kapasitas fiskal mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan untuk Korupsi dan kemiskinan mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap tinggi rendahnya kemiskinan.

Junaidi (2010) penelitian mengenai “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan (Simultaneous Equation Models) dengan metode persamaan tunggal (Limited Information Methods) dan metode sistem (Full Information Methods). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif terhadap tingkat kemiskinan Indonesia. Sedangkan untuk kemiskinan menunjukkan hasil berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Teori Kemiskinan

Menurut World Bank (2007) definisi kemiskinan adalah “The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati banyaknya pilihan dan kesempatan untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Menurut Nurskhe, (dalam Indra .M. 2014) berpendapat bahwa “a poor country is a poor because it is poor”. Kemiskinan disebabkan oleh keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal sehingga menyebabkan produktivitas suatu negara rendah yang mendorong pendapatan negara tersebut juga rendah. Ketika pendapatan rendah maka investasi dan

tabungan yang dimiliki juga rendah, hal tersebut akan kembali mendorong keterbelakangan ekonomi negara.

World Bank (2004) mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Dimana apabila pendapatan seseorang kurang dari U\$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin. Dilihat dari definisi kemiskinan menurut World Bank terdapat tiga ukuran kemiskinan sebagai berikut :

1. Indeks Angka Kemiskinan (poverty headcount index), yaitu jumlah penduduk dengan besar konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, dimana sering disebut insiden kemiskinan (poverty inciden).
2. Indeks Kesenjangan Kemiskinan (poverty gap index), yaitu terjadinya penurunan terhadap konsumsi agregat atau terdapat perbedaan pendapatan untuk seluruh masyarakat terhadap garis kemiskinan, dengan nilai nol (0) diberikan kepada mereka yang berada di atas garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (poverty severity index), ukuran ini dihitung dengan mekuadratkan seberapa besar penurunan konsumsi per kapita terhadap garis kemiskinan.

Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2004), Produk Domestik Regional Bruto merupakan tolak ukur utama dalam melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi suatu negara. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Dalam pertumbuhan ekonomi juga terdapat cara mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam tahun tersebut, sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhanekonomitahun}_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

Dalam teori Neo-Klasik menerangkan bahwa, pertumbuhan ekonomi bergantung pada penambahan tersedianya faktor produksi seperti jumlah penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal disertai dengan kemajuan faktor teknologi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mirza (2012), pembangunan yang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang berkualitas di setiap negara. Tolak ukur kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM yang berkualitas adalah dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

IPM dapat dilihat melalui tiga komponen data yang dianggap dapat mendorong keberhasilan pembangunan manusia sebagai berikut: (1) angka harapan hidup yang menggambarkan keberhasilan dalam bidang kesehatan, (2) angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah menggambarkan keberhasilan dalam bidang pendidikan, (3) kemampuan daya beli yang mana dapat dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita sebagai gambaran keberhasilan dibidang pembangunan hidup yang layak. Terdapat empat kriteria Indeks Pembangunan Manusi (IPM) sebagai berikut :

Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$

Tinggi : $70 \leq IPM < 80$

Sedang : $60 \leq \text{IPM} < 70$
 Rendah : $\text{IPM} < 60$

Korupsi

World Bank (2010), korupsi merupakan penyalahgunaan kekuatan yang dimiliki seseorang dalam mengakses keuangan publik untuk kepentingan pribadi. Keuntungan tersebut bukan hanya digunakan secara individu, tetapi juga kelompok tertentu dalam masyarakat yaitu kepentingan politik, suku, pertemanan, atau bahkan hubungan keluarga itu sendiri.

Menurut Blackburn et al. (2006), korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan. Namun, beberapa orang menganggap bahwa korupsi digunakan sebagai oiling the wheel untuk birokrasi, terkadang korupsi juga dapat bermanfaat bagi perekonomian (Huntington, 1968; Lui, 1985). Sebaliknya, Tanzi (1998) mengklaim bahwa korupsi dapat menimbulkan biaya birokrasi yang besar.

Indonesia memiliki ukuran dalam menganalisa korupsi yaitu melalui lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII) meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). IPK digunakan untuk melihat kualitas tata kelola pemerintah dalam segi ekonomi berdasarkan persepsi mereka disuatu daerah. Sedangkan untuk Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia, melihat korupsi dengan mengelompokkan sesuai kasus yang terjadi. Terdapat beberapa jenis kasus yaitu penyelewengan APBD, penyelewengan proyek atau bantuan sosial, penyuapan, perpajakan, dan pengadaan lahan.

METODE PENELITIAN

1. Pengukuran Data dan Variabel

Jenis penelitian ini adalah penelitian Diskriptif Kuantitatif. Metode diskriptif kuantitatif adalah metode analisa pada suatu objek penelitian yang dilakukan untuk menekankan analisisnya dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk numerik yang diolah dengan metode statistika tertentu dan diinterpretasikan dalam bentuk uraian (Sugiyono, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM dan korupsi terhadap kemiskinan di Indonesia. Periode yang diambil antara tahun 2013 – 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari data PDRB ADHK (2010) sebagai data pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tindak perkara korupsi. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) dan Indonesia Corruption Watch.

2. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode regresi data panel yang mana akan dipilih pendekatan yang terbaik dari common effect, fixed effect, random effect dengan cara menggunakan suatu uji regresi data panel yaitu Uji Chow dan Uji Hausman. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, IPM dan korupsi terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan. Dengan model persamaan :

$$KM_{it} = \alpha - b1PDRB_{it} - b2IPM_{it} + b3AK_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

KM_{it}	= Kemiskinan (Jumlah/Jiwa)
α	= <i>constant</i>
b1, b2, b3	= Koefisien regresi
$PDRB_{it}$	= Jumlah PDRB provinsi i pada tahun t (dalam ribuan rupiah)
IPM_{it}	= Indeks Pembangunan Manusia provinsi i pada tahun t (persentase)
AK_{it}	= Angka Korupsiprovinci i pada tahun t (jumlah korupsi)
e	= <i>Error Term</i>

Metode Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan estimasi metode regresi panel dengan menggunakan uji F-statistic yaitu melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, Uji t yaitu dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen sendiri-sendiri terhadap variabel dependen, dan Koefisien Determinasi (R^2 -adjusted) yaitu besarnya derajat kemampuan variabel bebas terhadap variabel terikat dari suatu regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.613284		30.0540

Sumber: Eviews 9, 2017 (data diolah)

Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	52.077690	(33,201)	0.0000
Cross-section Chi-square	537.058501	33	0.0000

Sumber: Eviews 9, 2017 (data diolah)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua (2) metode yaitu regresi data panel dan regresi linier berganda.

Regresi Data Panel

Pemilihan model terbaik dalam penelitian ini menggunakan uji regresi data panel dari common Effects Model, Fixed Effect Model, Random Effect

Model dengan uji analisis terbaik, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5. Berikut ini :

Tabel 1. Hasil Estimasi Model

VariabelBebas	Common Effects Model		Fixed Effect Model		Random Effect Model	
	Coefficient	T statistic	Coefficient	T statistic	Coefficient	T statistic
Coefficient	2.055884	0.526532	6.642301	3.515086	6.322839	2.874228
Perumbuhan Eko. (X1)	-2.115162	1.393698	-1.276702	1.868425	-1.289384	1.505789
IPM (X2)	-1.024663	8.879070	-0.666649	4.414964	-0.739919	5.435452
Korupsi (X3)	3.413949	9.281207	2.194037	4.906092	2.414460	5.972796
R ² (R-squared)	0.276356		0.924226		0.150483	
F - statistic	29.78781		68.10099		13.81689	
Prob (F- statistic)	0.000000		0.000000		0.000000	

Note: * = significant at 0.01; ** = significant at 0.05; *** = significant at 0.10

Berdasarkan hasil uji regresi data panel yang telah diolah dan dibandingkan pemilihan uji terbaik yang digunakan dalam mengestimasi pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, dan korupsi terhadap kemiskinan di Indonesia adalah Fixed Effect Model. Dipilihnya model Fixed Effect karena berdasarkan hasil uji Chow diperoleh Probabilitas = 0.0000 yang mana nilai tersebut kurang dari $\alpha = 0.05$ sehingga tolak Ho maka dinyatakan model Fixed Effect yang terpilih, sedangkan untuk uji Hausman diperoleh Probabilitas = 0.0540 yang mana nilai tersebut kurang dari $\alpha = 0.05$ sehingga tolak Ho maka dinyatakan model Fixed Effect yang terpilih. Sehingga dapat disimpulkan dari Uji Chow dan Uji Hausman model regresi yang terbaik untuk mengestimasi masing-masing variabel terhadap kemiskinan di Indonesia adalah Fixed Effect Model.

Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji regresi data panel yang telah dilakukan dan dibandingkan nilai yang terbaik maka terpilih model regresi yang digunakan adalah Fixed Effect Model. Dalam pengujian hipotesis peneliti menggunakan metode regresi linier berganda dengan pengujian Uji t-statistic dan Uji F statistic. Berikut tabel 4. yang menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 34 provinsi selama periode 2013-2017.

Tabel 2. Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Bebas	Coefficient	T statistic	Prob.
Coefficient	6.642301	3.515086	0.0005
Pertumbuhan Eko. (X1)	-1.276702	-1.868425	0.1436
IPM (X2)	-0.666649	-4.414964	0.0000
Korupsi (X3)	2.194037	4.906092	0.0000
<i>(dilanjutkan pada hal 9)</i>			
<i>(Lanjutan halaman 8)</i>			
R ² (R-squared)	0.924226		
F - statistic	68.10099		
Prob (F-statistic)	0.000000		

Note: * = significant at 0.01; ** = significant at 0.05; *** = significant at 0.10

Sumber: Eviews 9, 2017 (data diolah)

Koefisien Determinasi R² (R-squared)

Koefisien determinasi R²(R-squared) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan himpunan variasi variabel dependen. Dari hasil regresi tabel 4. Dengan pendekatan Fixed Effect Model diketahui nilai R² = 0.924226 atau 92% berarti bahwa keragaman variasi variabel kemiskinan di Indonesia mampu dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, dan korupsi sedangkan sisanya 8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Uji Signifikasi Bersama-sama (Uji Simultan F)

Uji F statistik digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh bersama-sama semua variabel independen terhadap variabel dependen, dengan menggunakan Fixed Effect Model diperoleh nilai probabilitas (F-statistic) = 0.000000. nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen, yaitu minimal satu diantara variabel pertumbuhan ekonomi, IPM dan korupsi mempengaruhi variabel kemiskinan provinsi-provinsi di Indonesia

Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t-statistik)

Uji t-statistik digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini nilai alpha yang ditentukan sebesar 0.05 ($\alpha=0.05$). Berdasarkan tabel 4. dapat diketahui pada variabel pertumbuhan ekonomi nilai t-statistik = -1.868425 dengan probabilitas = 0.1436 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Untuk variabel IPM nilai t-statistik = -4.414964 dengan probabilitas = 0.0000 maka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Untuk variabel korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai t-statistik = 4.906092 dan probabilitas = 0.0025.

Uji Cross Section

Untuk mengetahui daerah yang memiliki pengaruh paling besar untuk pertumbuhan di Provinsi, maka perlu dilakukan Uji Cross Section. Berikut tabel hasil uji cross section :

Tabel 3. Uji Cross Section

<i>CROSSID</i>	<i>Coefficient</i>
Papua Barat	16,018798
Papua	15,301328
Sumatra Selatan	15,029368
Lampung	14,507481
Jawa Tengah	14,160020
<i>(dilanjutkan pada hal 10)</i>	
<i>(Lanjutan halaman 9)</i>	
Aceh	13,538502
Maluku	13,340747
Bengkulu	12,681554
Sulawesi Tenggara	12,660674
Nusa Tenggara Timur	10,897935

Gorontalo	10,679750
Nusa Tenggara Barat	9,561349
D.I. Yogyakarta	8,075158
Sulawesi Tengah	7,650455
Jawa Timur	6,276240
Sulawesi Barat	5,828731
Sumatera Utara	3,856153
Sulawesi Utara	3,166600
Kepulauan Riau	2,667658
Sulawesi Selatan	2,562959
Riau	2,383788
Sumatera Barat	1,941595
Kalimantan Timur	1,815396
Jambi	1,659398
D.K.I Jakarta	1,403137
Jawa Barat	0,704583
Bali	0,493130
Maluku Utara	0,243061
Kalimantan Utara	0,19680
Kep. Bangka Belitung	-5,83821
Kalimantan Tengah	-6,18937
Kalimantan Barat	-8,52697
Banten	-10,02765
Kalimantan Selatan	-21,97871

Sumber: Eviews 9, 2017 (data diolah)

Dari pengolahan uji regresi dan uji data panel dengan menggunakan model Fixed Effect Model, dapat diketahui persamaan regresi antara variabel independen dan dependen yaitu pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

Estimate Equation :

$$Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 + C(4)*X3 + [CX=F]$$

Substituted Coefficient :

$$Y = 6.64230107631 - 1.27670221626*X1 - 0.666649115149*X2 + 2.19403715192*X3 + [CX=F]$$

Setelah melakukan pengujian hipotesis, dalam penelitian ini dilakukan uji cross section dengan melihat pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, IPM dan korupsi terhadap kemiskinan di setiap provinsi di Indonesia yang dinyatakan pada tabel 6. Dari hasil tabel tersebut dapat dilihat bahwa provinsi Papua Barat merupakan daerah yang memiliki tingkat pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM dan korupsi tertinggi terhadap perubahan presentase kemiskinan di Indonesia dengan nilai 15,15270. Dan provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki tingkat pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM dan korupsi terendah terhadap perubahan presentase kemiskinan di Indonesia dengan nilai -1,702209. Rata-rata perbedaan

kemiskinan antara daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dengan daerah yang memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu $= 15,155270 - (-1,702209) = 13.453061$.

Pembahasan

Pada pengujian regresi data panel dengan model Fixed Effect didapatkan hasil yaitu pertumbuhan ekonomi (X1) berpengaruh tidak signifikan, IPM (X2), dan korupsi (X3) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y). Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya apabila pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,2767023%. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sadono Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan dari Produk Domestik Regional Bruto, yang mana bukan hanya diukur dari kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil tetapi harus melihat sejauh mana pendistribusian pendapatan telah merata ke seluruh masyarakat dan siapa yang menikmati hasilnya. Apabila pendapatan tersebut tidak merata maka penduduk akan tetap terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan akan tetap miskin. Pertumbuhan ekonomi yang bagus menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda data panel dengan model fix effect, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya apabila IPM naik sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,024663%. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila IPM mengalami peningkatan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Jika dilihat dari hasil bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan maka hal ini sesuai dengan pendapat Todaro (2000) yang mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan agar kemiskinan dapat berkurang.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda data panel dengan model fix effect, variabel korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya apabila korupsi naik sebesar 1% maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 3.413949%. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila korupsi mengalami peningkatan maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Jika dilihat dari hasil bahwa korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan maka hal ini sesuai dengan pendapat Eric, dkk (2003) mengatakan bahwa semakin tinggi korupsi dapat mendorong negara tersebut miskin. Sebab semakin banyak angka korupsi di negara tersebut maka akan menurunkan kepercayaan investor untuk berinvestasi, sehingga nilai investasi akan turun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian telah diolah dan dianalisis mengenai “ Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Korupsi Terhadap Kemiskinan di

Indonesia” dengan model regresi linier berganda (data panel) dengan model fix effect, adapun kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Kedua, korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Ketiga, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

KETERBATASAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan dalam periode dan variabel. Penelitian ini menggunakan periode jangka pendek dimana hanya terbatas tujuh tahun saja. Adapun untuk variabel-variabel hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, korupsi, dan kemiskinan.

Dari hasil kesimpulan maka saran peneliti yaitu, pemerintah harus lebih baik dan merata dalam penyebaran APBD pada tiap provinsi serta penambahan lapangan pekerjaan dengan sistem padat karya agar jumlah pengangguran berkurang serta Program peningkatan peranan wanita dalam segala bidang pekerjaan sehingga dapat menurunkan kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sudah mulai membaik, diharapkan untuk selanjutnya pemerintah memiliki program yang lebih baik dalam peningkatan IPM yaitu memperbaiki pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat miskin adanya perbaikan lingkungan rumah tinggal, mendorong mereka untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan berperilaku hidup sehat sehingga program pengentasan kemiskinan akan lebih baik.

Pemerintah diharapkan mampu memerangi korupsi, dengan program membangun keadilan di bidang hukum dengan tidak melakukan tebang pilih hukuman, sekaligus membuta jera para penyeleweng APBD dengan memiskinkan harta yang dimilikinya. Selain itu pemerintah harus memperbaiki kinerjanya dalam mengatur pendanaan dan pembiayaan dengan jaminan independensi transparansi dan adil yang menjamin kesempatan bagi semua pihak untuk memiliki akses ke kekuasaan. Jika perlu, mereka bisa mengundang organisasi internasional untuk terlibat dalam proses politik, seperti pemilihan, sebagai pengamat atau pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous, 2016. Modul Ekonometrika Dengan Software Eviews 6. Malang: Laboratorium IESP UMM.

Arsyad, L. 1992. Ekonomi Pembangunan. Edisi ke 2. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Badan Pusat Statistik. 2017. Indeks Pembangunan Manusia 2013-2017. Indonesia, Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. 2017. Angka Kriminalitas 2013-2017. Indonesia, Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 2013-2017. Indonesia, Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Indeks Kemiskinan 2013-2017. Indonesia, Badan Pusat Statistik.
- Chien-Chien, dkk. 2004. Crime And Poverty: A Search-Theoretic Approach. *Jurnal Ilmiah*. Vol.45. No.3.
- Franciari .S. 2012. Analisis Hubungan Ipm, Kapasitas Fiskal, Dan Korupsi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2008 Dan 2010). *Jurnal Ilmiah*.
- Gujarati, dkk. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi kelima. Jakarta:Salemba Empat.
- Halvor Mehlum, dkk. 2004. Crime Induced Poverty Traps. *Jurnal Ilmiah*.
- Happy .F, dkk. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik. Vol.5. No.2. *Jurnal Ilmiah*.
- Himawan Yudistira Dama, dkk. 2016. Pengaruh Produk Domestik regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado. *Jurnal Ilmiah*. Vol.16.
- Indonesia Corruption Watch. www.antikorupsi.org (diakses pada tanggal 10 Desember 2018)
- Jonaidi .A. April 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. Vol.1. No.1. *Jurnal Ilmiah*.
- Jonathan .H & Khandker .S. 2009. Handnook of Poverty + Inequality. The Role of The World Bank.
- Kuncoro, M. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan* Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Siregar .H. (2007). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin". *Jurnal Ilmiah*.
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses, masalah, dan Dasar Kebijakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sukirno, S. 2007. *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Edisi 1-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 2012. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanti .S. 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. Vol.9. No.1. *Jurnal Ilmiah*.
- Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ketujuh. Jakarta: Erlangga.

Transparency International Indonesia. "Infografis Corruption Perception Indeks (CPI)". <http://ti.or.id> (diakses pada 10 Desember 2018)

Yayuk Eko, W. 2014. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah*, Vol.1.

Waluyo .J. Agustus 2010. Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan: Suatu Studi Lintas Negara. Vol.8. No.2. *Jurnal Ilmiah*.

Widiastuti .T. Korupsi Dalam Pandangan Cognitive Dissonance Theory. *Jurnal Ilmiah*.

World Bank. 2007. *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*. The Role of The World Bank.